

# ANALISIS KEMISKINAN *dan* PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN REMBANG**

**ANALISIS KEMISKINAN *dan***  
**PERTUMBUHAN EKONOMI**  
**KABUPATEN REMBANG**

**2019**

## **ANALISIS KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG 2019**

ISBN :  
Nomor Publikasi : 33170.2032  
Katalog : 3205008.3317

Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29,7 cm)  
Jumlah Halaman : xvi + 48 halaman

### **Naskah :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

### **Penyunting :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

### **Gambar Kulit :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

### **Diterbitkan oleh :**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

### **Dicetak oleh :**

Art Print

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

## ABSTRAK

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang. Sebab ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial, termasuk kemiskinan dan pengangguran.

Data yang digunakan dalam publikasi “Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2019” berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2015-2019 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang. Publikasi ini hanya membahas pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan pada tahun 2017 menjadi 6,98 persen, tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, dua tahun berikutnya terus melambat hingga menjadi 5,20 persen, terendah selama periode 2015-2019. Sementara itu angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan dari 19,50 persen menjadi 15,41 persen.

Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa laju dan kemampuan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang dapat mengurangi angka kemiskinan, meskipun kemiskinan tetap menurun ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga cenderung mengalami penurunan,.

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah dalam upaya menuju keberhasilan pembangunan. Tetapi masyarakat secara keseluruhan, termasuk penduduk miskin, juga harus diikutsertakan dan menyadari bahwa mereka juga salah satu subjek dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

**Tim Penyusun**  
**ANALISIS KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**  
**KABUPATEN REMBANG 2019**

**Pengarah:**

Henri Wagiyanto, S.Pt, MEc.Dev, MA

**Penanggung Jawab:**

Henri Wagiyanto, S.Pt, MEc.Dev, MA

**Penyunting:**

Herhardana, S.Si

**Penulis:**

Faisal Luthfi Arief, SST

**Pengolah Data:**

Faisal Luthfi Arief, SST

**Desain/Layout:**

Faisal Luthfi Arief, SST  
Sukaryo

## KATA PENGANTAR

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rembang. Sehubungan hal tersebut, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang menyajikan publikasi “**Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2019**”.

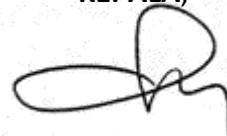
Publikasi ini berisi tentang data dan informasi mengenai kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dan indikator lain yang terkait dengan kedua masalah tersebut di Kabupaten Rembang. Data yang disajikan merupakan hasil penghitungan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan PDRB Tahun 2018. Agar dapat diamati perkembangannya, maka ditampilkan pula data series dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan sebagian kebutuhan data, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan dapat terpenuhi. Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama bagi pengambil kebijakan dan semua pihak yang berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini diterbitkan diucapkan terimakasih.

Rembang, Desember 2020

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN REMBANG

KEPALA,



HENRI WAGIYANTO



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran .....	xiii
Infografis .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	1
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>3</b>
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
2.2. Definisi Kemiskinan .....	4
2.2.1. Jenis-jenis Kemiskinan .....	4
2.2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran .....	7
2.3. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan .....	8
<b>BAB III. METODOLOGI .....</b>	<b>11</b>
3.1. Metode Penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	11
3.2. Metode Penghitungan Kemiskinan .....	12
<b>BAB IV. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG.....</b>	<b>19</b>
4.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Rembang .....	19
4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang .....	21
4.3. PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang .....	22
<b>BAB V. KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG .....</b>	<b>25</b>
5.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang .....	25
5.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang.....	27
5.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang .....	29



<b>BAB VI. KETERKAITAN ANTARA KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>39</b>

<https://rembangkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen) .....	20
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen).....	21

<https://rembangkab.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang, 2015-2019.....	23
Gambar 5.1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2015-2019 .....	25
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 .....	26
Gambar 5.3	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2015-2019 (Rp) .....	28
Gambar 5.4	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 .....	29
Gambar 5.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang, 2015-2019.....	30
Gambar 6.1	Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2015-2019 .....	33
Gambar 6.2	Persentase Penduduk Miskin, Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Persentase Penurunan Kemiskinan Per 1% LPE di Kabupaten Rembang, 2015-2019.....	34



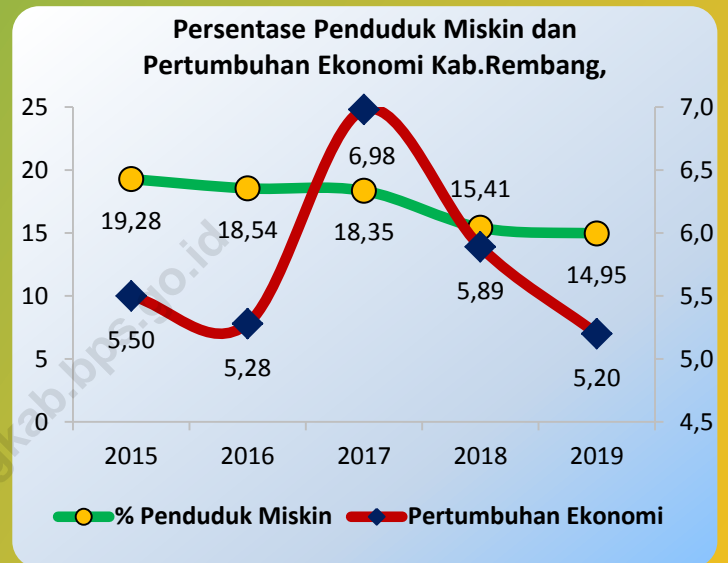
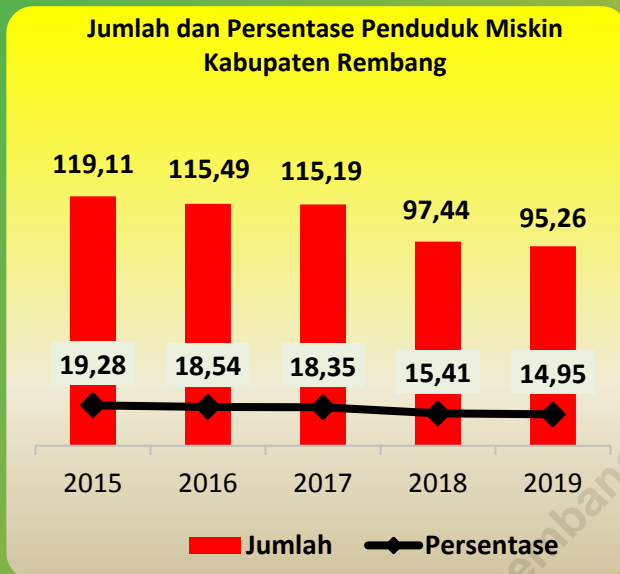
## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	PDRB Seri 2010 adh Berlaku, adh Konstan dan PDRB per Kapita Kabupaten Rembang, 2015-2019 .....	41
Tabel 2.	PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen) .....	42
Tabel 3.	PDRB Seri 2010 Adh Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen) .....	43
Tabel 4.	Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen) .....	44
Tabel 5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen) .....	45
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2015-2019.....	46
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2018 .....	47
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 .....	48



# Infografis

## Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2019



Persentase Penduduk Miskin, Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penurunan Kemiskinan Per 1% LPE di Kab. Rembang

P1

- Indeks Kedalaman Kemiskinan = 2,32

P2

- Indeks Keparahan Kemiskinan = 0,48

GK

- Garis Kemiskinan = Rp 384.561,-





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan adalah persoalan sosial ekonomi mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama Pemerintah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Rembang. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan Pemerintah, namun pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan bahkan ada indikasi semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan yang diambil kurang tepat sasaran, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

### **1.2. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini antara lain untuk :

- a. Mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang
- b. Mengetahui perkembangan kemiskinan Kabupaten Rembang
- c. Melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

### 1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk kemiskinan dan distribusi pendapatan merupakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan data PDRB tahun 2015-2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang.

Dalam penulisan ini disajikan juga series data, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dengan tersedianya series data tersebut, perencana dan pengambil kebijakan program pembangunan di Kabupaten Rembang dapat menyusun program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan lebih baik.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam 8 (delapan) bab, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sumber data serta sistematika penulisan.
- Bab II. Kajian Pustaka**, merupakan kajian literatur/pustaka yang menjelaskan konsep PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
- Bab III. Metodologi**, menjelaskan tentang metode penghitungan pertumbuhan ekonomi, indikator kemiskinan yang mencakup tentang persentase penduduk miskin, ukuran kedalaman kemiskinan dan ukuran keparahan kemiskinan serta konsep dari beberapa istilah.
- Bab IV. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang**, membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kabupaten Rembang.
- Bab V. Kemiskinan di Kabupaten Rembang**, membahas tentang perkembangan kemiskinan, garis kemiskinan dan ukuran indeks kemiskinan di Kabupaten Rembang.
- Bab VI. Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**, membahas keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
- Bab VII. Penutup**, berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan penutup.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

**PDRB adhb (atas dasar harga berlaku)** adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud dengan **Nilai Tambah** yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

**PDRB adhk (atas dasar harga konstan)** adalah cerminan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari data yang tersedia di masing-masing sektor/sub sektornya.

### **PENDAPATAN PERKAPITA (*INCOME PER CAPITA*)**

Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu pendapatan perkapita,

### **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah pertumbuhan PDB secara rill, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana produk domestik regional bruto mengalami peningkatan (Winardi, 2010). Pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional diukur dengan kenaikan PDB, sedangkan untuk tingkat daerah diukur dengan peningkatan PDRB. Pada dasarnya kedua hal tersebut tidak berbeda, hanya saja skala perhitungan yang mencakup daerah atau nasional.

## 2.2. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a). Terpenuhinya kebutuhan pangan, (b). kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c). rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, (d). hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

### 2.2.1. Jenis-jenis Kemiskinan

#### a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "sepanjang masih ada kehidupan, orang miskin akan selalu hadir bersama kita".

Dalam prakteknya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh *Ravallion* (1998 : 26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan tetapi dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai

untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

#### **b. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut adalah “tetap/tidak berubah” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). *Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya dan jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.* Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 per hari, dengan batasan ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per hari yang diperkirakan lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

### c. Terminologi Kemiskinan

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut menyebabkan mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, Suku Tengger di Pegunungan Tengger Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya Suku Badui di Cibeo Banten Selatan, Suku Dayak di pedalaman Pulau Kalimantan, dan suku Kubu di Provinsi Jambi.

Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan

bermasyarakatnya itu dalam kenyataan akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti misalnya posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang dicapai dan dapat didayagunakan olehnya itu akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai surat nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

### **2.2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran**

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Demikian pula kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, seperti misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan



keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah :

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

### **2.3. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan karena berbagai alasan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan

menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan sektor-sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah (*low skill labor*). *Keempat*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan (Rajasa, 2007).

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Karena itu, indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali digabungkan dalam analisis dan penilaian kemiskinan.



## BAB III METODOLOGI

### 3.1. Metode Penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun sektoral

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) dapat dipakai formula sebagai berikut :

$$G = \left[ \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \right] \times 100$$

dimana :            G        : Laju pertumbuhan  
                         P<sub>t</sub>        : PDRB adhk tahun ke-t  
                         P<sub>t-1</sub>    : PDRB adhk sebelum tahun ke-t

#### 2. Indikasi tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah

Tinggi rendahnya tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah dari besar kecilnya angka pendapatan per kapita, yang diukur dari pendekatan pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

Dengan laju pertumbuhan per kapita yang positif dan tingkat pendapatan yang meningkat dan mantap, maka hal tersebut menjadi indikasi kemakmuran masyarakat juga semakin meningkat.

### 3.2. Metode Penghitungan Kemiskinan

Dengan memperhatikan konsep dan definisi kemiskinan yang sangat luas, upaya untuk mengukur kemiskinan menjadi tidak mudah. Secara garis besar pengukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan data pendapatan atau pengeluaran rata-rata perkapita, tergantung ketersediaan datanya. Pendekatan kualitatif dapat menggunakan indikator individu (angka kematian bayi, partisipasi sekolah, harapan hidup, dan sebagainya) atau indikator rumah tangga (kondisi rumah, proporsi pengeluaran makanan rumah tangga). Pengukuran kemiskinan yang paling banyak digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada data pendapatan/pengeluaran perkapita dan datanya diperoleh dari survei rumah tangga. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan kemiskinan seperti berapa jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah, bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang di sajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Serta mulai tahun 2011 pengumpulan data Susenas dilakukan triwulanan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, *penduduk miskin* adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan

dari komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sebagai berikut :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk setiap provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan.

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 % penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara adalah Garis Kemiskinan periode lalu di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Penyertaan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

dengan :

**GKM<sub>jp</sub>** = Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

**P<sub>jkp</sub>** = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

**Q<sub>jkp</sub>** = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

**V<sub>jkp</sub>** = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

**J** = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

**P** = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM<sub>j</sub> tersebut disertakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga *implicit* rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

dengan :

$K_{jkp}$  = Kalori dari komoditi k daerah j provinsi p.

$\overline{HK}_{jp}$  = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

dengan :

$GKM_{jp}$  = Kebutuhan makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau garis kemiskinan makanan (GKM)

J = Daerah (perkotaan/perdesaan)

P = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan garis kemiskinan (GKMN) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data susenas, modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil survei paket komoditi kebutuhan dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per-komoditi non-makanan yang lebih rinci

dibandingkan data susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} \cdot V_{kjp}$$

dengan :

$GKNM_{jp}$  = Pengeluaran minum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

$V_{kjp}$  = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah dan provinsi p (dari susenas modul konsumsi).

$r_{kj}$  = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

K = Jenis komoditi makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

P = Povinsi (perkotaan atau perdesaan)

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan :

$$\% PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

dengan :

$\% PM_p$  = % Penduduk miskin di provinsi p.

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

$P_p$  = Jumlah penduduk di provinsi p.



Sementara itu, penduduk miskin untuk level Nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin Provinsi atau :

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

Dengan :

$PM_I$  = Penduduk miskin Indonesia.

$PM_p$  = Penduduk miskin provinsi p.

n = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\% PM_I = \frac{PM_I}{P_I}$$

dengan :

$\% PM_I$  = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

$PM_I$  = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

$P_I$  = Jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang dapat digunakan :

- Head count index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
- Indeks kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Tyhorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dengan :

$\alpha$  = 0, 1, 2

$z$  = Garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Jika  $\alpha=0$ , diperoleh *Head count Index* (P0), jika  $\alpha=1$  diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan jika  $\alpha=2$  disebut indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*).

Berdasarkan garis kemiskinan tingkat provinsi di atas, maka angka tersebut digunakan sebagai patokan sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota. Penduduk yang berada dibawah kelas batas (kelas dimana garis kemiskinan GK berada) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dihitung rata-rata pengeluaran perkapitanya yaitu:

$\bar{Y}_{px}$  = Pengeluaran perkapita untuk Provinsi, dan

$\bar{Y}_{kx}$  = Pengeluaran perkapita untuk Kabupaten/Kota.

Perbandingan keduanya dipakai sebagai pendekatan perbedaan harga barang konsumsi antar daerah yang dibayar penduduk dibawah percentil ke X, dengan asumsi bahwa paket (bundel) barang dan kualitas serta kuantitas antara provinsi dan kabupaten sama.

Rasio perbandingan harga antara provinsi dan kabupaten diperkirakan sebagai berikut :

$$R_{kx} = \frac{\overline{Y}_{kx}}{\overline{Y}_{px}}$$

$R_{kx}$  akan sama dengan 1 (satu) apabila tingkat harga yang dibayar penduduk miskin di provinsi sama dengan tingkat harga di kabupaten. Bila rasio tersebut tidak sama dengan satu, berarti ada perbedaan tingkat harga yang dibayar penduduk miskin di kedua daerah tersebut. Selanjutnya garis kemiskinan di kabupaten dihitung menggunakan formula :

$$GK_{ko} = R_{kx} \cdot GK_{po}$$

dimana :

$GK_{ko}$  = Garis kemiskinan kabupaten k

$R_{kx}$  = Rasio rata-rata pengeluaran penduduk perkapita dibawah percentil ke x di Kabupaten k

$GK_{po}$  = Garis kemiskinan provinsi p dibawah percentil ke x

## **BAB IV**

### **PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG**

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mendorong kemakmuran dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan.

#### **4.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Rembang**

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, struktur perekonomian Kabupaten Rembang masih didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal demikian menggambarkan keadaan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang mendapatkan penghasilan atau bekerja di sektor tersebut. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, peranannya mulai mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya lapangan usaha yang lain, seperti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya, terutama dalam tiga tahun terakhir (**Tabel 4.1**). Industri Pengolahan juga menunjukkan

kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hingga kontribusinya mencapai lebih dari 21 persen sejak tahun 2015. Di sisi lain, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terus menurun selama lima tahun terakhir.

**Tabel 4.1. Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017*	2018**	2019***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,99	28,94	28,11	27,18	25,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,12	3,14	4,00	4,01	4,21
C	Industri Pengolahan	21,15	21,65	21,82	22,38	23,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,41	7,50	7,51	7,61	7,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,77	12,87	12,80	12,95	13,37
H	Transportasi dan Pergudangan	3,59	3,54	3,48	3,49	3,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,08	3,06	3,01	3,01	3,13
J	Informasi dan Komunikasi	1,02	1,04	1,09	1,13	1,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,22	4,30	4,25	4,24	4,15
L	Real Estate	0,90	0,90	0,88	0,87	0,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,28	0,28	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	3,82	3,64	3,53	3,45
P	Jasa Pendidikan	5,47	5,67	5,81	5,94	6,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,26	1,27	1,29	1,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,84	1,94	1,94	1,99	2,06
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019

Keterangan : \* Angka diperbaiki  
 \*\* Angka sementara  
 \*\*\* Angka sangat sementara

## 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang

Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017*	2018**	2019***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,16	1,85	5,82	1,80	-3,49
B	Pertambangan dan Penggalian	4,03	6,39	20,70	6,60	11,03
C	Industri Pengolahan	7,66	7,63	7,69	8,14	8,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,59	6,77	7,07	7,58	6,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,71	2,98	3,71	2,20	4,44
F	Konstruksi	6,18	7,46	7,61	6,88	8,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,11	5,37	6,33	7,78	8,06
H	Transportasi dan Pergudangan	6,78	5,44	6,04	7,46	8,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,13	5,72	6,09	7,11	9,78
J	Informasi dan Komunikasi	7,27	7,88	10,48	12,38	12,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	6,84	4,38	3,77	3,10
L	Real Estat	6,18	5,87	5,04	5,36	5,59
M,N	Jasa Perusahaan	8,84	9,92	8,48	6,97	10,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,87	2,78	2,27	3,23	3,11
P	Jasa Pendidikan	6,81	7,63	8,05	8,54	8,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,75	9,95	8,39	8,89	8,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,07	8,42	8,58	9,87	9,96
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,50</b>	<b>5,28</b>	<b>6,98</b>	<b>5,89</b>	<b>5,20</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019

Keterangan : \* Angka diperbaiki  
 \*\* Angka sementara  
 \*\*\* Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Selama periode tahun 2015-2019 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen. Setelah pada tahun

2016 kembali melambat menjadi sebesar 5,28 persen, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami percepatan pada tahun 2017 hingga mencapai 6,98 persen, tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, prestasi tersebut kembali menurun pada tahun 2018 dimana pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,89 persen hingga mencapai yang terendah pada tahun 2019 menjadi 5,20 persen.

Perlambatan perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 disebabkan dengan melambatnya lapangan usaha Pertanian, dari 1,80 persen hingga menjadi -3,49 persen. Sebagai penyumbang kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang, menurunnya pertumbuhan lapangan usaha Pertanian cukup berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara keseluruhan. Selain itu, didukung dengan beberapa lapangan usaha yang mengalami perlambatan, antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan.

#### **4.3. PDRB per Kapita Kabupaten Rembang**

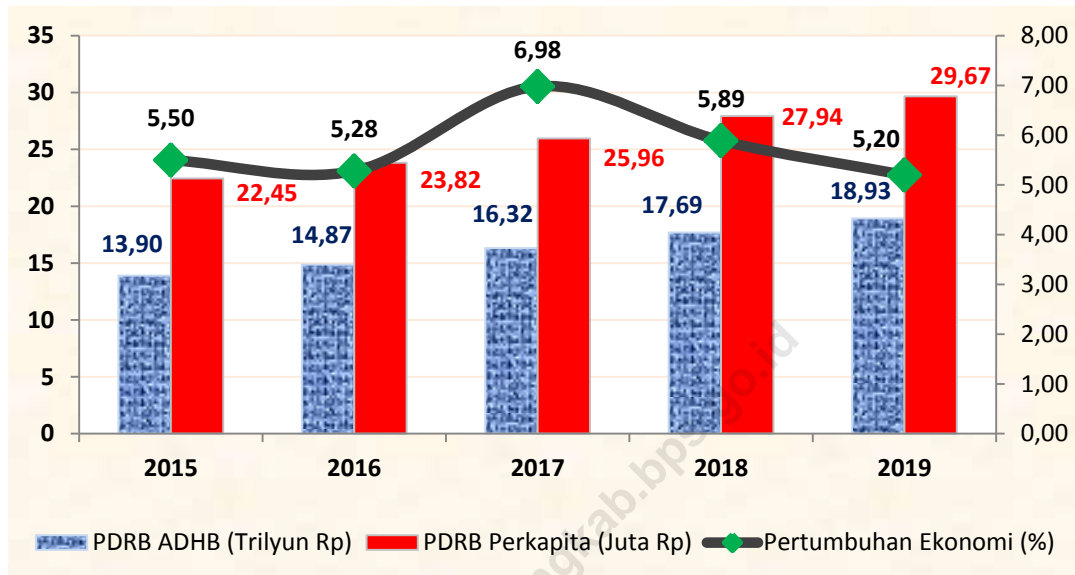
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor perekonomian di suatu daerah, yang dihitung dari PDRB adh berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataannya.

Dari **Gambar 4.1** terlihat PDRB per kapita Kabupaten Rembang mengalami kenaikan tiap tahunnya selama kurun waktu 2015-2019. PDRB per kapita menurut harga berlaku tahun 2015 sekitar 22,45 juta rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 29,67 juta rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2019 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang mencapai 29,67 juta rupiah.

Meskipun perkembangan PDRB per kapita selalu mengalami kenaikan, yang berarti ada peningkatan pendapatan, namun belum dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Kabupaten Rembang yang sebenarnya. Hal tersebut karena ada kepemilikan faktor produksi yang tidak hanya dimiliki oleh warga

Rembang saja, tetapi sebagian juga dimiliki oleh penduduk di luar Kabupaten Rembang. Oleh karena itu PDRB per kapita Kabupaten Rembang belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Rembang.

**Gambar 4.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang, 2015 - 2019**



Sumber : PDRB Kabupaten Rembang 2015-2019, BPS

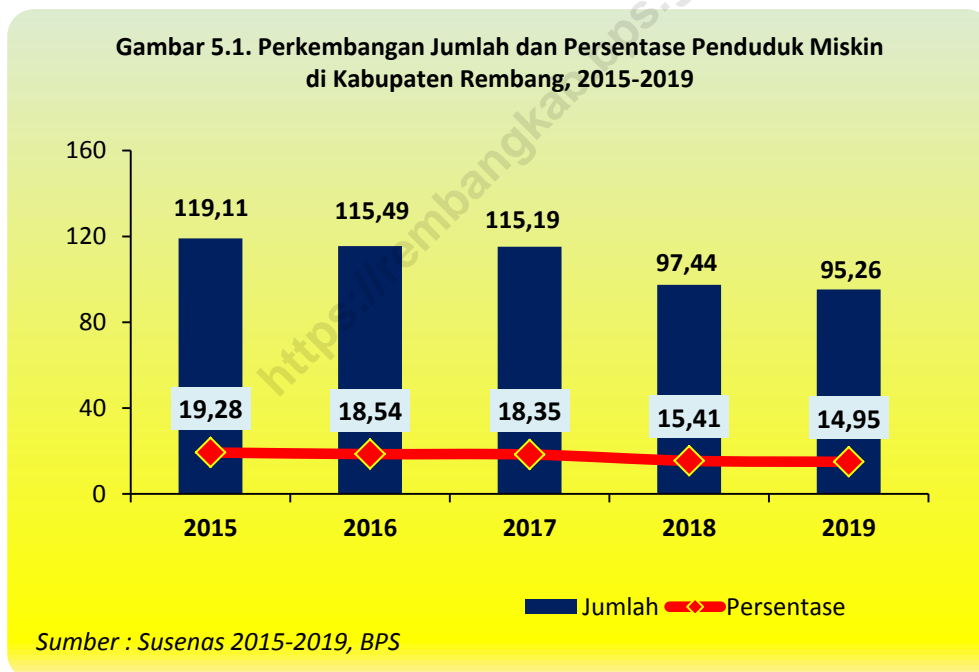




## BAB V KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG

### 5.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang

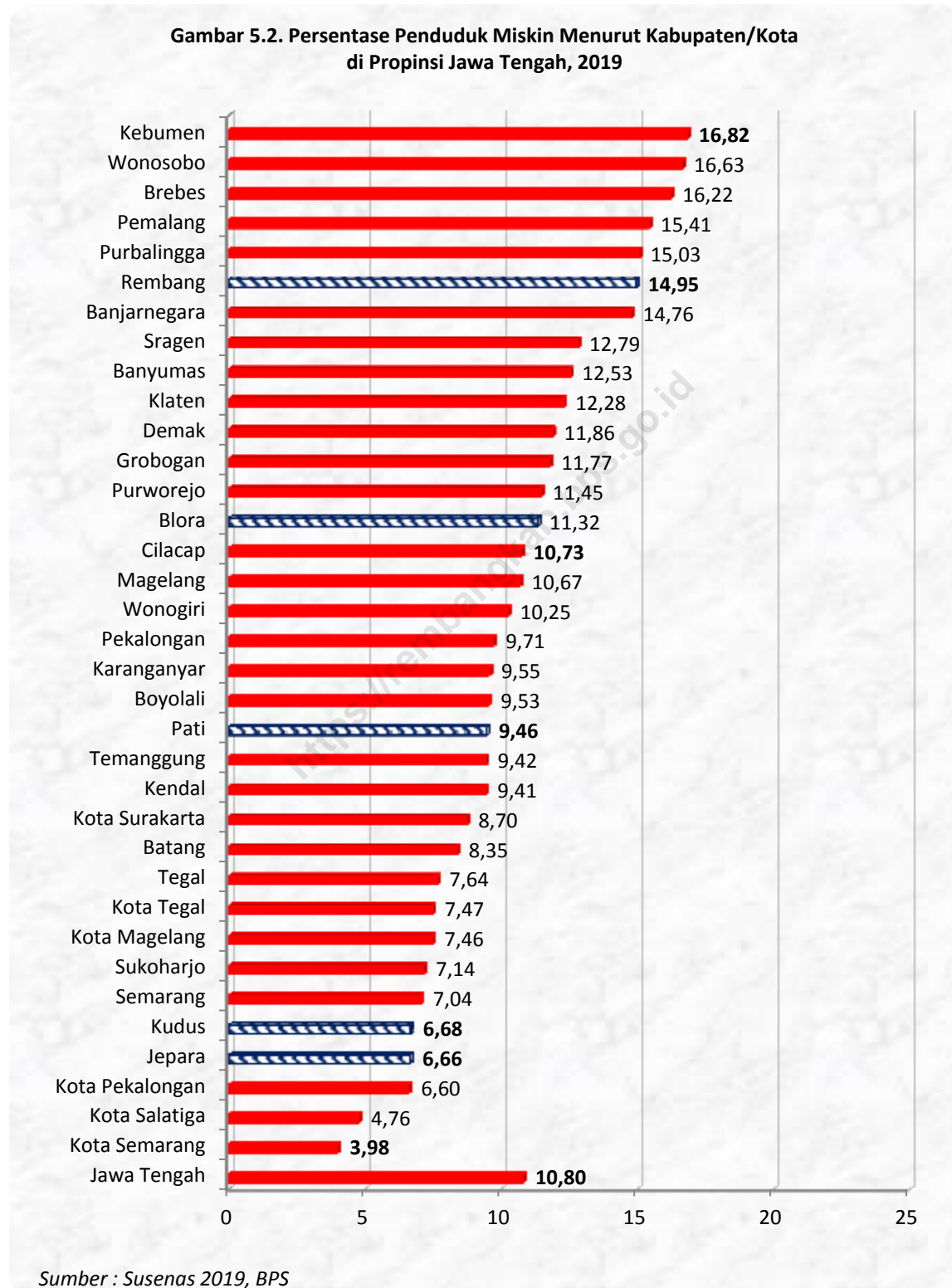
Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada periode tahun 2015-2019 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada **Gambar 5.1** terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 sebanyak 119,11 ribu jiwa. Setelah itu jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga menjadi 95,26 ribu jiwa pada tahun 2019. Kondisi tersebut tentunya cukup menggembirakan, karena penduduk miskin Kabupaten Rembang berkurang 2,18 ribu orang atau turun sebesar 2,24 persen.



Perubahan jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2015-2019 berpengaruh juga terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 19,28 persen. Setelah itu antara tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan hingga menjadi 14,95 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2015-2019, persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan Kabupaten

Rembang turun kurang dari satu persen setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam hingga 2,94 persen dibandingkan tahun 2017.

**Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, 2019**



Sumber : Susenas 2019, BPS

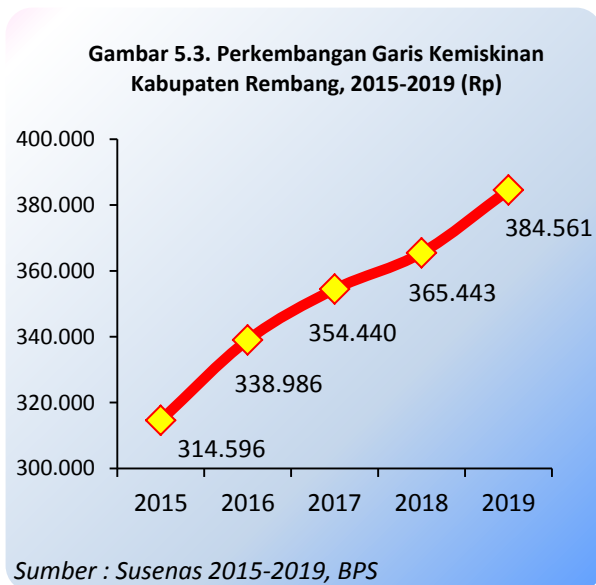
Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (14,95 persen) pada tahun 2019 berada di peringkat 6 (enam) tertinggi dari 35 kabupaten/kota, setelah Kabupaten Kebumen (16,63 persen), Kabupaten Wonosobo (16,63 persen), Kabupaten Brebes (16,22 persen), Kabupaten Pemalang (15,41 persen), dan Kabupaten Purbalingga (15,03 persen) dan Kabupaten Banjarnegara (15,46 persen). Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana Kabupaten Rembang menempati posisi ketujuh yang pada tahun 2019 ditempati Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan Kabupaten Kabupaten Wonosobo yang pada tahun 2018 menempati peringkat pertama, turun posisinya digantikan Kabupaten Kebumen. Sementara itu kabupaten/kota yang terendah persentase penduduk miskinnya masih Kota Semarang (3,98 persen), kemudian diikuti Kota Salatiga (4,76 persen) dan Kota Pekalongan (6,60 persen). Posisi tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 10,80 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 11,32 persen. Terlihat juga pada **Gambar 5.2** bahwa dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 14 kabupaten/kota yang persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari angka Provinsi, tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Di wilayah eks-Karesidenan Pati, Kabupaten Rembang (14,95 persen) memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dibanding kabupaten lainnya. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah tercatat di Kabupaten Jepara (6,66 persen), diikuti Kabupaten Kudus sebesar 6,68 persen. Sementara itu persentase penduduk miskin Kabupaten Pati dan Blora berkisar antara 9-12 persen.

## **5.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang**

Garis kemiskinan adalah batasan untuk mengetahui miskin atau tidaknya seseorang. Seseorang yang mempunyai pendapatan yang lebih kecil dari garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang miskin dan sebaliknya.



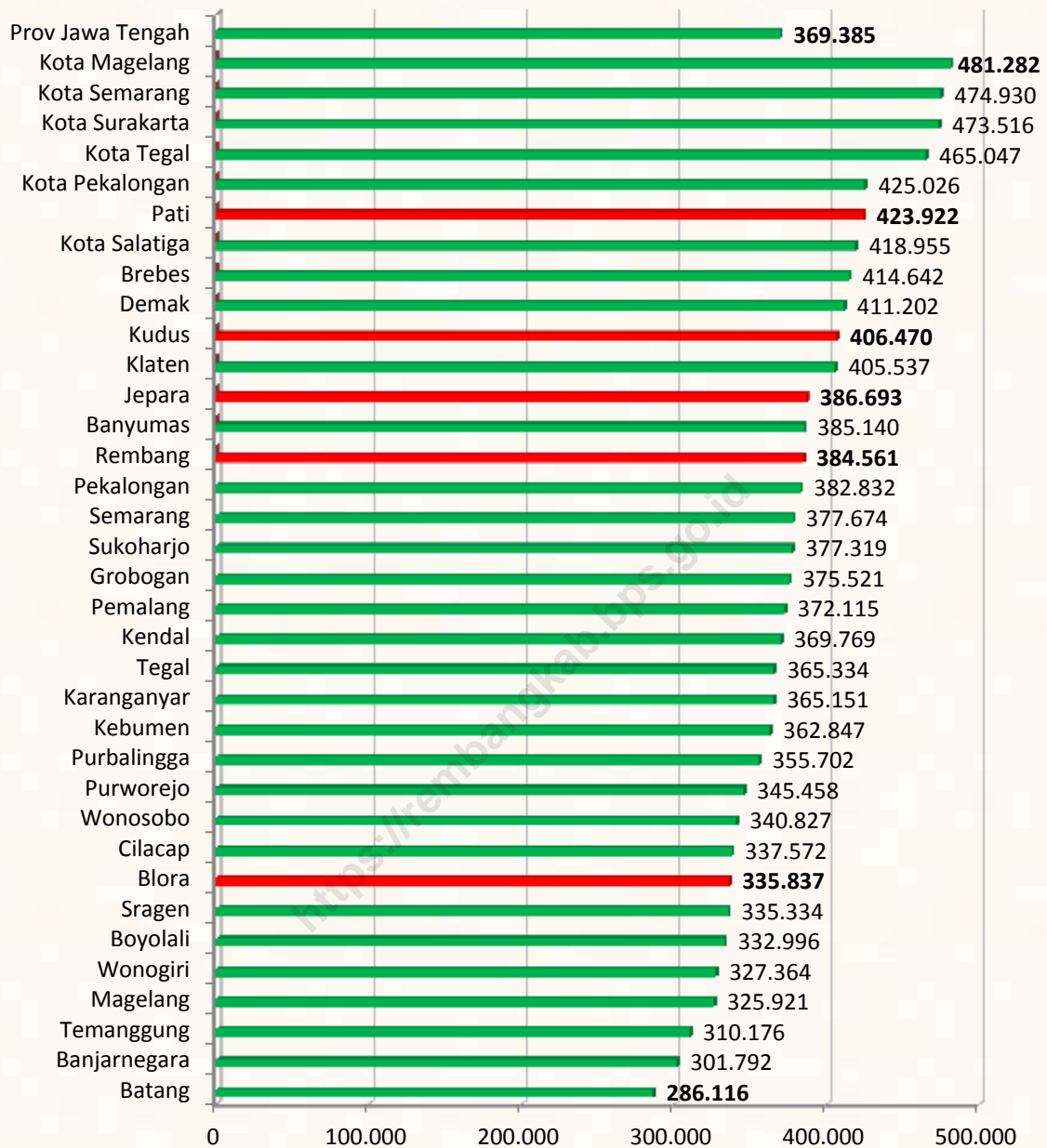
Perkembangan garis kemiskinan pada periode tahun 2015-2019 terlihat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2015-2019 garis kemiskinan Kabupaten Rembang mengalami kenaikan sebesar 69.965 rupiah/kapita/bulan, yaitu dari 314.596 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2015 menjadi 384.561 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2019.

Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena memang trend kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Mencermati dari **Gambar 5.3**, juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 maksimal sebesar 314.596 rupiah dan pada tahun 2019 mengalami perubahan menjadi 384.561 rupiah.

Pada tahun 2019, garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah terdapat di Kota Magelang yaitu sebesar 481.282 rupiah/kapita/bulan, diikuti oleh Kota Semarang (474.930 rupiah/kapita/bulan) dan Kota Surakarta (473.516 rupiah/kapita/bulan). Sedangkan Kabupaten Rembang sendiri menempati peringkat ke-14, naik satu peringkat dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, garis kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Batang sebesar 286.116 rupiah/kapita/bulan. Untuk Provinsi Jawa Tengah, garis kemiskinannya sebesar 369.385 rupiah/kapita/bulan (**Gambar 5.4**).

Di wilayah Eks-Karesidenan Pati, garis kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Pati, yaitu sebesar 423.922 rupiah/kapita/bulan, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 406.470 rupiah/kapita/bulan. Selanjutnya berturut-turut Kabupaten Jepara, Rembang, dan yang terendah adalah Kabupaten Blora. Bahkan hanya Kabupaten Blora yang memiliki garis kemiskinan di bawah angka Provinsi Jawa Tengah di wilayah Eks-Karesidenan Pati.

**Gambar 5.4. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, 2019**



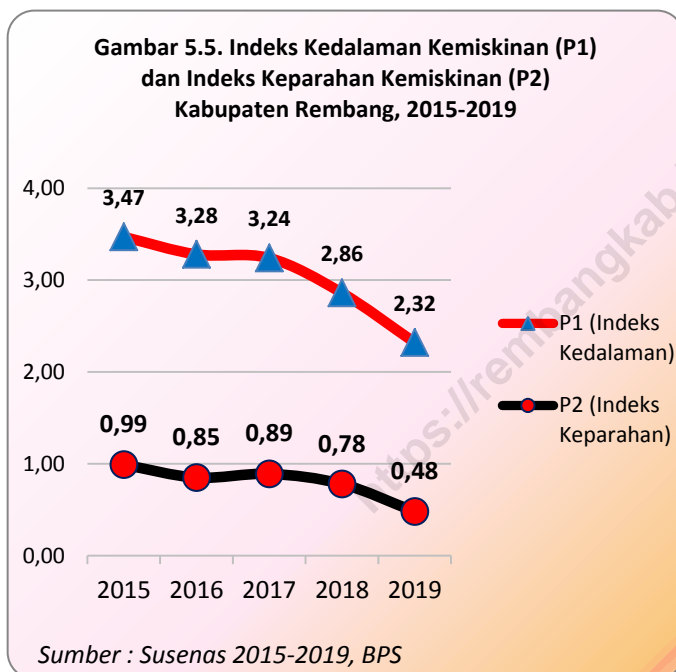
Sumber : Susenas 2019, BPS

### 5.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin,

kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan diukur dari indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap/P1*), sedangkan tingkat keparahan kemiskinan diukur dari indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity/P2*). Ukuran P1 menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka penduduk miskin ini semakin menjauhi garis kemiskinan tersebut. Sedangkan ukuran P2 menunjukkan adanya penyebaran pengeluaran dari penduduk. Semakin tinggi nilai dari indeks ini, maka diantara penduduk miskin terjadi kesenjangan yang semakin melebar.



Pada tahun 2015 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 3,47, merupakan paling tinggi selama lima tahun terakhir, dan turun pada tahun 2016 menjadi 3,28, Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati garis kemiskinan, yang berarti tingkat perekonomian penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2016

mengalami peningkatan dari tahun 2015. P1 terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,32 pada tahun 2019, paling rendah selama lima tahun terakhir. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang selama periode tahun 2015-2019 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti terjadi perbaikan pada perekonomian penduduk miskin selama lima tahun terakhir.

Kondisi yang agak berbeda terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang perkembangannya mengalami fluktuatif pada periode tahun 2015-2019. Nilai P2 pada tahun 2015 sebesar 0,99, tertinggi selama lima tahun terakhir, dan turun pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2017 P2 naik kembali menjadi 0,89, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 semakin melebar dibandingkan tahun 2016. Setelah itu, P2 terus mengalami penurunan selama dua tahun terakhir hingga menjadi 0,48, yang berarti ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang selama tahun 2018-2019 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

<https://rembangkab.bps.go.id>

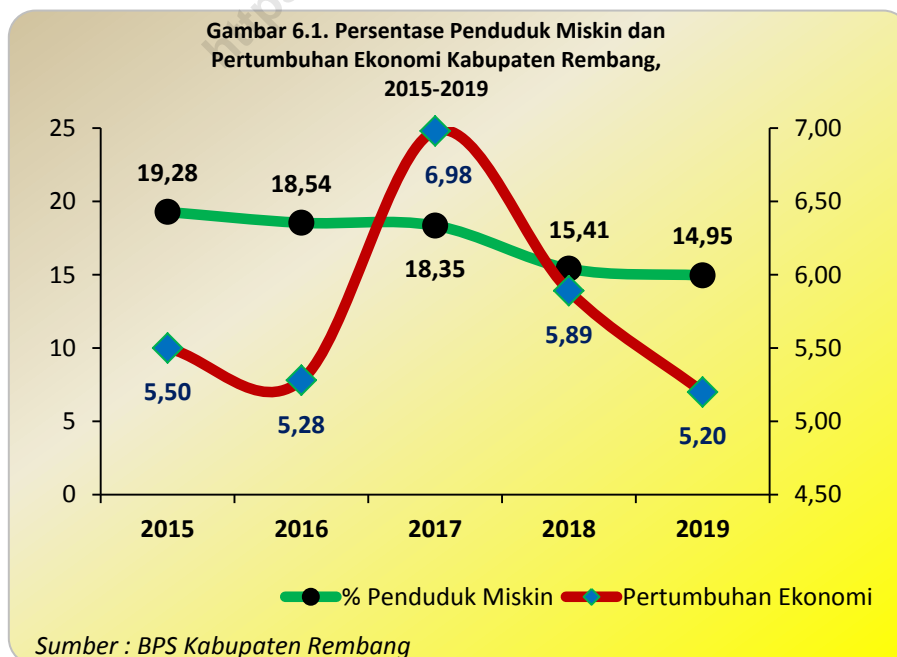




## BAB VI KETERKAITAN ANTARA KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

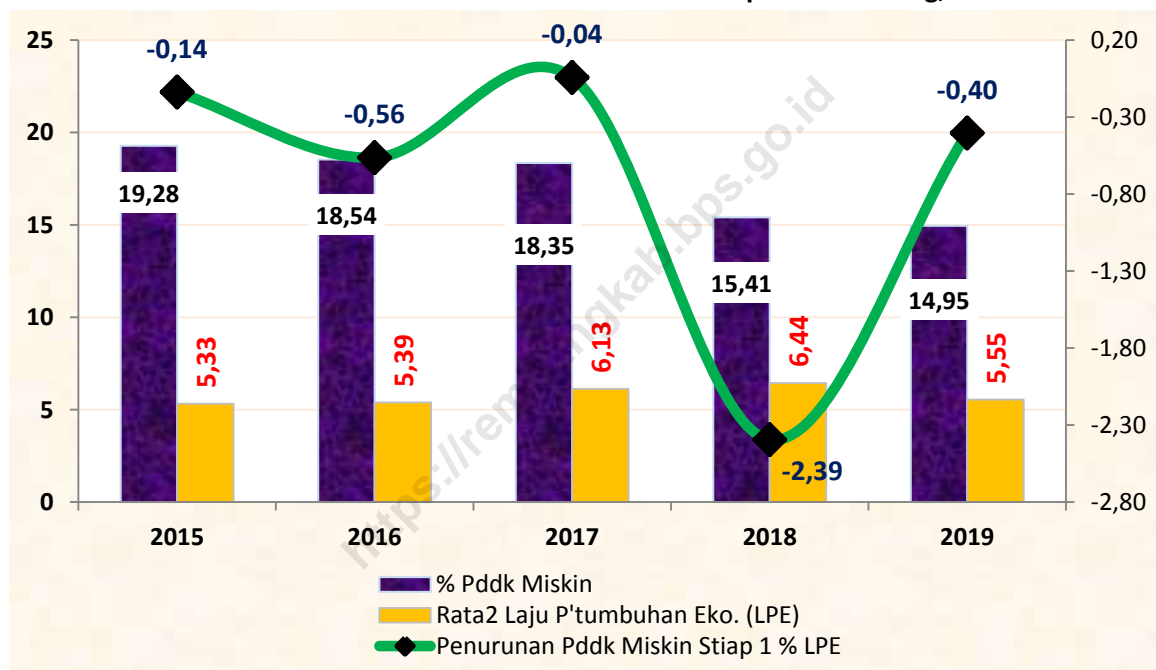
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, walaupun tidak dapat berdiri sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Pada **Gambar 6.1** terlihat bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang antara tahun 2016-2017 mengalami percepatan dari 5,28 persen menjadi 6,98 persen, angka kemiskinan menurun dari 18,54 persen menjadi 18,35 persen.

Namun, ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mengalami perlambatan dari 5,50 persen pada tahun 2015 menjadi 5,28 persen pada tahun 2016, persentase penduduk miskin menurun dari 19,28 persen menjadi 18,54 persen. Demikian juga ketika pertumbuhan ekonomi melambat dari 6,98 persen menjadi 5,20 persen antara tahun 2018-2019, kemiskinan masih tetap turun dari 18,35 persen menjadi 15,95 persen.



Bila diamati lebih lanjut dengan **Gambar 6.2**, pada periode tahun 2015-2019 kemampuan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tertinggi dalam menurunkan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,39 poin, karena rata-rata pertumbuhannya paling tinggi (6,44 persen). Sebaliknya, kemampuan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 (0,04 poin) merupakan yang paling rendah dalam menurunkan persentase penduduk miskin, meskipun rata-rata pertumbuhannya (6,13 persen) menjadi yang kedua paling tinggi setelah tahun 2019.

**Gambar 6.2. Persentase Penduduk Miskin, Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penurunan Kemiskinan Per 1% LPE di Kabupaten Rembang, 2015-2019**



Sumber : BPS Kabupaten Rembang

Secara keseluruhan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62 persen selama periode tahun 2015-2019 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 119,11 ribu pada tahun 2015 menjadi 95,26 ribu pada tahun 2019 atau berkurang sebesar 20,02 persen. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui juga bahwa telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 3,47 poin apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 (satu) persen, yang berarti kemampuan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,47 poin.

## **BAB VII PENUTUP**

Secara umum tingkat perekonomian Kabupaten Rembang selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan, karena pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan selama dua tahun terakhir. Di sisi lain, angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Selain itu, terdapat beberapa catatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi, antara lain :

1. Kabupaten Rembang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi hanya pada tahun 2017 selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, pada tahun 2015-2016 dan tahun 2017-2019 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi angka kemiskinan tetap menurun.
2. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2017 selama periode tahun 2015-2019 dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang yang ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan terbesar pada tahun 2018. Hal tersebut ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang masih tinggi, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2017.
3. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan 2018, menyebabkan rata-rata pertumbuhannya menjadi yang tertinggi selama periode tahun 2015-2019, sehingga kemampuan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam menurunkan persentase kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang perlu ditangani lebih serius oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Perlu disadari, pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang menjadikan distribusi pendapatan lebih merata, mengurangi pengangguran, perbaikan upah buruh dan nilai tukar petani, serta penanggulangan kemiskinan lainnya sebagai prioritas penting dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif. Diperlukan program jangka pendek dan jangka panjang yang cerdas dari semua unsur pemerintahan yang ada untuk kelancaran dan kemudahan dalam

membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya. Selain itu, penduduk miskin juga perlu diikutsertakan dan diberdayakan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan.

<https://rembangkab.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Maret 2020)*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2020. *PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha 2015-2019* . Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2019. *Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2018*. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
- Bappenas, 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Desa*. Jakarta.
- Esmara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- , *International Definition and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide* (New York : United Nations , 1961).
- Rajasa, Hatta M. 2007. *Upaya Negara Maju Mengantisipasi Kemiskinan* (Pernah disampaikan dalam acara “Forum Dialog Terbatas Centre for Information and Development Studies (CIDES),” di Jakarta, pada 26 Juni 2007).
- Ravallion, Martin. 1998. *Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study*, World Bank : Working Paper No. 13.
- Suyanto, Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Thee Kian Wie. 1981. *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Winardi. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.



# *LAMPIRAN*

*Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Rembang 2019*





**Tabel 1. PDRB Seri 2010 adh Berlaku, adh Konstan dan PDRB per Kapita  
di Kabupaten Rembang, 2015-2019**

Tahun	PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	PDRB adh Konstan		PDRB Per Kapita (Ribu Rp)
		Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
2015	13 897 816,58	10 850 269,20	5,50	22,45
2016	14 871 689,64	11 423 008,30	5,28	23,82
2017*	16 324 716,54	12 220 172,17	6,98	25,96
2018**	17 690 401,67	12 939 882,29	5,89	27,94
2019***	18 934 343,91	13 612 548,40	5,20	29,67

*Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Seri 2010)*

*Keterangan : \* Angka diperbaiki      \*\* Angka sementara      \*\*\* Angka sangat sementara*

**Tabel 2 PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017*	2018**	2019***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 168 479,14	4 304 605,42	4 589 185,51	4 807 491,23	4 737 063,40
B	Pertambangan dan Penggalian	433 924,07	466 795,90	653 005,16	709 090,14	797 938,05
C	Industri Pengolahan	2 939 112,10	3 219 174,66	3 561 492,43	3 958 542,89	4 374 255,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9 110,24	10 351,25	11 938,13	13 130,01	14 003,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 188,70	6 412,17	6 684,05	6 952,33	7 371,38
F	Konstruksi	1 029 561,92	1 115 264,32	1 225 818,40	1 346 853,27	1 503 003,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 775 107,00	1 913 729,12	2 089 486,19	2 290 627,81	2 531 902,85
H	Transportasi dan Pergudangan	499 050,45	526 759,91	568 689,05	616 608,47	680 934,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	427 554,85	454 939,89	491 019,99	532 027,72	593 155,56
J	Informasi dan Komunikasi	142 416,45	154 072,17	177 937,06	199 888,84	227 849,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	586 425,16	638 905,25	694 270,68	749 586,35	785 014,88
L	Real Estate	124 658,42	133 460,25	143 670,05	154 271,75	165 065,03
M,N	Jasa Perusahaan	36 898,79	41 042,09	45 135,73	49 446,65	56 098,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	534 912,82	567 661,05	593 597,74	624 607,15	652 709,24
P	Jasa Pendidikan	760 055,63	843 510,01	948 028,24	1 051 057,96	1 164 784,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169 145,79	186 904,57	207 599,38	228 625,51	253 817,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	255 215,06	288 101,61	317 158,75	351 593,59	389 377,21
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>13 897 816,58</b>	<b>14 871 689,64</b>	<b>16 324 716,54</b>	<b>17 690 401,67</b>	<b>18 934 343,91</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Seri 2010)

Keterangan : \* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

\*\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 3 PDRB Seri 2010 Adh Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017*	2018**	2019***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 117 527,80	3 175 229,36	3 359 989,86	3 420 620,20	3 301 209,00
B	Pertambangan dan Penggalian	323 291,63	343 953,89	415 158,93	442 569,44	491 369,68
C	Industri Pengolahan	2 307 391,43	2 483 367,33	2 674 357,21	2 892 128,43	3 151 232,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9 434,85	10 073,49	10 785,29	11 602,97	12 345,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 640,84	5 809,15	6 024,43	6 157,13	6 430,23
F	Konstruksi	824 642,21	886 134,34	953 602,86	1 019 201,11	1 106 695,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 464 601,23	1 543 234,41	1 640 950,86	1 768 561,65	1 911 117,00
H	Transportasi dan Pergudangan	443 036,47	467 117,18	495 339,15	532 271,35	577 832,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	356 833,89	377 230,99	400 207,68	428 676,64	470 605,06
J	Informasi dan Komunikasi	155 940,86	168 223,59	185 855,76	208 868,01	235 633,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	425 297,66	454 403,01	474 317,34	492 205,73	507 476,33
L	Real Estate	112 044,16	118 620,31	124 600,64	131 275,23	138 612,02
M,N	Jasa Perusahaan	30 679,79	33 723,93	36 584,32	39 135,33	43 287,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	410 088,03	421 480,84	431 049,12	444 971,97	458 799,88
P	Jasa Pendidikan	520 048,58	559 728,80	604 775,53	656 453,17	712 014,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129 087,85	141 929,71	153 844,22	167 516,22	182 551,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	214 681,91	232 747,97	252 728,97	277 667,71	305 334,39
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>10 850 269,20</b>	<b>11 423 008,30</b>	<b>12 220 172,17</b>	<b>12 939 882,29</b>	<b>13 612 548,40</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Seri 2010)

Keterangan : \* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

\*\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 4 Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2015-2019 (Persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017*	2018**	2019***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,99	28,94	28,11	27,18	25,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,12	3,14	4,00	4,01	4,21
C	Industri Pengolahan	21,15	21,65	21,82	22,38	23,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,41	7,50	7,51	7,61	7,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,77	12,87	12,80	12,95	13,37
H	Transportasi dan Pergudangan	3,59	3,54	3,48	3,49	3,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,08	3,06	3,01	3,01	3,13
J	Informasi dan Komunikasi	1,02	1,04	1,09	1,13	1,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,22	4,30	4,25	4,24	4,15
L	Real Estate	0,90	0,90	0,88	0,87	0,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,28	0,28	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	3,82	3,64	3,53	3,45
P	Jasa Pendidikan	5,47	5,67	5,81	5,94	6,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,26	1,27	1,29	1,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,84	1,94	1,94	1,99	2,06
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100 00</b>	<b>100 00</b>	<b>100 00</b>	<b>100 00</b>	<b>100 00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Seri 2010)

Keterangan : \* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

\*\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2015-2019 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017*	2018**	2019***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,16	1,85	5,82	1,80	-3,49
B	Pertambangan dan Penggalian	4,03	6,39	20,70	6,60	11,03
C	Industri Pengolahan	7,66	7,63	7,69	8,14	8,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,59	6,77	7,07	7,58	6,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,71	2,98	3,71	2,20	4,44
F	Konstruksi	6,18	7,46	7,61	6,88	8,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,11	5,37	6,33	7,78	8,06
H	Transportasi dan Pergudangan	6,78	5,44	6,04	7,46	8,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,13	5,72	6,09	7,11	9,78
J	Informasi dan Komunikasi	7,27	7,88	10,48	12,38	12,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	6,84	4,38	3,77	3,10
L	Real Estate	6,18	5,87	5,04	5,36	5,59
M,N	Jasa Perusahaan	8,84	9,92	8,48	6,97	10,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,87	2,78	2,27	3,23	3,11
P	Jasa Pendidikan	6,81	7,63	8,05	8,54	8,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,75	9,95	8,39	8,89	8,98
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,07	8,42	8,58	9,87	9,96
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,50</b>	<b>5,28</b>	<b>6,98</b>	<b>5,89</b>	<b>5,20</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Seri 2010)

Keterangan : \* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

\*\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 6 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	119,11	19,28	3,47	0,99	314 596
2016	115,49	18,54	3,28	0,85	338 986
2017	115,19	18,35	3,24	0,89	354 440
2018	97,44	15,41	2,86	0,78	365 443
2019	95,26	14,95	2,32	0,48	384 561

Sumber : Susenas 2015-2019, BPS

**Tabel 7 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2018**

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	193,18	11,25	1,87	0,44	320 106
3302	Banyumas	226,23	13,50	2,60	0,70	366 442
3303	Purbalingga	144,16	15,62	2,79	0,74	324 735
3304	Banjarnegara	141,72	15,46	2,08	0,45	278 210
3305	Kebumen	208,66	17,47	2,48	0,55	342 437
3306	Purworejo	83,55	11,67	1,67	0,36	335 995
3307	Wonosobo	138,32	17,58	3,25	0,78	323 490
3308	Magelang	143,44	11,23	1,55	0,34	296 327
3309	Boyolali	98,23	10,04	1,26	0,25	304 575
3310	Klaten	151,73	12,96	1,72	0,38	397 447
3311	Sukoharjo	65,43	7,41	0,97	0,17	345 363
3312	Wonogiri	102,84	10,75	1,71	0,41	293 357
3313	Karanganyar	87,79	10,01	1,70	0,43	348 896
3314	Sragen	116,37	13,12	2,31	0,59	312 106
3315	Grobogan	168,70	12,31	1,67	0,35	366 192
3316	Blora	102,50	11,90	1,62	0,37	308 520
3317	Rembang	97,44	15,41	2,86	0,78	365 443
3318	Pati	123,94	9,90	1,37	0,29	414 316
3319	Kudus	59,99	6,98	0,88	0,19	393 078
3320	Jepara	86,54	7,00	0,71	0,13	371 296
3321	Demak	144,12	12,54	2,09	0,55	402 211
3322	Semarang	75,67	7,29	1,51	0,45	341 576
3323	Temanggung	75,39	9,87	1,36	0,29	287 981
3324	Kendal	94,70	9,84	1,85	0,47	353 127
3325	Batang	66,08	8,69	1,08	0,23	256 549
3326	Pekalongan	89,54	10,06	1,40	0,31	361 297
3327	Pemalang	208,34	16,04	2,96	0,83	351 183
3328	Tegal	114,06	7,94	1,41	0,44	332 298
3329	Brebes	309,17	17,17	3,51	1,04	405 932
3371	Kota Magelang	9,59	7,87	1,07	0,21	476 582
3372	Kota Surakarta	46,99	9,08	1,47	0,35	464 063
3373	Kota Salatiga	9,24	4,84	0,69	0,13	380 856
3374	Kota Semarang	73,65	4,14	0,58	0,12	427 511
3375	Kota Pekalongan	20,52	6,75	1,01	0,22	415 172
3376	Kota Tegal	19,44	7,81	1,23	0,30	455 488
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>3 897,20</b>	<b>11,32</b>	<b>1,85</b>	<b>0,45</b>	<b>350 875</b>

Sumber : Susenas 2018, BPS



**Tabel 8 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019**

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	185,18	10,73	1,28	0,21	337 572
3302	Banyumas	211,65	12,53	2,52	0,67	385 140
3303	Purbalingga	140,07	15,03	2,24	0,47	355 702
3304	Banjarnegara	136,10	14,76	2,38	0,55	301 792
3305	Kebumen	201,34	16,82	2,58	0,65	362 847
3306	Purworejo	82,17	11,45	0,84	0,10	345 458
3307	Wonosobo	131,35	16,63	2,44	0,46	340 827
3308	Magelang	137,45	10,67	0,98	0,17	325 921
3309	Boyolali	93,75	9,53	1,02	0,14	332 996
3310	Klaten	144,14	12,28	1,46	0,27	405 537
3311	Sukoharjo	63,55	7,14	0,87	0,14	377 319
3312	Wonogiri	98,28	10,25	0,82	0,11	327 364
3313	Karanganyar	84,46	9,55	1,45	0,35	365 151
3314	Sragen	113,83	12,79	2,31	0,59	335 334
3315	Grobogan	161,92	11,77	0,90	0,13	375 521
3316	Blora	97,86	11,32	1,59	0,34	335 837
3317	Rembang	95,26	14,95	2,32	0,48	384 561
3318	Pati	118,98	9,46	1,47	0,31	423 922
3319	Kudus	58,00	6,68	0,83	0,17	406 470
3320	Jepara	83,47	6,66	0,64	0,10	386 693
3321	Demak	137,60	11,86	1,61	0,34	411 202
3322	Semarang	73,90	7,04	0,63	0,08	377 674
3323	Temanggung	72,57	9,42	0,51	0,05	310 176
3324	Kendal	91,20	9,41	1,47	0,32	369 769
3325	Batang	64,07	8,35	0,69	0,08	286 116
3326	Pekalongan	87,01	9,71	1,17	0,20	382 832
3327	Pemalang	200,67	15,41	2,55	0,57	372 115
3328	Tegal	109,94	7,64	0,64	0,09	365 334
3329	Brebes	293,18	16,22	2,31	0,47	414 642
3371	Kota Magelang	9,10	7,46	0,99	0,19	481 282
3372	Kota Surakarta	45,18	8,70	1,60	0,48	473 516
3373	Kota Salatiga	9,21	4,76	0,83	0,20	418 955
3374	Kota Semarang	71,97	3,98	0,57	0,12	474 930
3375	Kota Pekalongan	20,21	6,60	0,92	0,18	425 026
3376	Kota Tegal	18,64	7,47	1,15	0,24	465 047
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>3 743,23</b>	<b>10,80</b>	<b>1,53</b>	<b>0,30</b>	<b>369 385</b>

Sumber : Susenas 2019, BPS

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Raya Pati – Kudus KM 3, Pati  
Telp. (0295) 381905 dan Faks. (0295) 386056  
Situs web : <http://patikab.bps.go.id>  
Email : [hns3318@hns.go.id](mailto:hns3318@hns.go.id)